



**SENIN, 28 MEI 2018**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

# Kejati Kumpulkan Alat Bukti Tambahan

## Kebut Kasus TPP Selama

**BENGKULU** - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terus mengejar penyelidikan atas kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Seluma tahun 2017 dengan nilai mencapai Rp 50 miliar. Dikebutnya penyelidikan atas kasus yang diduga merugikan negara mencapai Rp 12 miliar ini, dikarenakan

dalam waktu dekat ini Kejati Bengkulu akan segera menaikkan berkas perkara menjadi penyidikan.

Diungkapkan Kajati Bengkulu, Baginda Polin Luban Gaol, SH, MH melalui Aspidus Henri Nainggolan, SH, MH, salah satu upaya pengumpulan alat bukti tambahan diantaranya dengan meminta keterangan dari ahli yang membidangi terkait dengan peraturan

Kemendagri, atau orang yang mengerti masalah Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pengucuran TPP tersebut.

"Ada beberapa berkas dari alat bukti yang perlu segera kita lengkapi agar perkara ini bisa naik ke penyidikan. Untuk itu kita perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kemendagri sebelum dalam waktu dekat ini kita mengeluarkan sprindiknya,"

terang Henri.

Diungkapkan Henri, dari hasil konsultasi tim dengan biro hukum Kemendagri, pihaknya menemukan ada aturan yang dilanggar dalam pencairan TPP di Kabupaten Seluma tahun 2017. Namun untuk lebih validnya, pihaknya masih menunggu hasil kajian dan analisa resmi dari Kemendagri. "Yang jelas ada aturan yang ditabrak oleh Pemkab Seluma dalam pencairan TPP. Karena dalam pencairan harusnya sesuai dengan peraturan Kemendagri dan Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya besaran TPP di lingkungan

Pemkab Seluma mendapat aksi protes. Hal ini karena adanya kesenjangan besaran TPP di OPD yang ber tipe A dan C. Besaran TPP pada OPD yang termasuk dalam TP4D, seperti jabatan Kepala Bidang (Kabid) di salah satu OPD besaran TPP nya mencapai Rp 14 juta, bahkan ada yang Rp 16 juta. Tentunya lebih besar dari Kepala OPD tipe A seperti di Dinas PU yang hanya menerima TPP sebesar Rp 13 juta. Bahkan dari informasi yang disampaikan untuk kepala bagian (kabag) di lingkungan Sekretariat Pemkab Seluma menerima TPP sebesar Rp 12 juta setiap bulannya. (sly)